



## Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara

Sarah E Simamora<sup>1\*</sup>, Puti Andiny<sup>2</sup>, Yani Rizal<sup>3</sup>, Safuridar<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samudra, Kota Langsa-Aceh, Indonesia

Alamat: Jl. Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24416

\*Korespondensi penulis: [sarahsimamora69@gmail.com](mailto:sarahsimamora69@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to analyze the impact of government spending in the health and infrastructure sectors on the Human Development Index (HDI) in North Sumatra Province over the period 2014-2023. The independent variables in this study are health and infrastructure spending, while the dependent variable is HDI. Secondary data were obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). The analysis method used is multiple linear regression with the assistance of Eviews 10 software. The results indicate that health spending has a positive and significant effect on HDI, whereas infrastructure spending has a negative and insignificant effect on HDI. The F-test confirms that health and infrastructure spending simultaneously have a significant effect on HDI. The coefficient of determination (Adjusted R-squared) shows that the independent variables explain 80.63% of the variation in HDI. These findings highlight the importance of increasing and stabilizing budget allocation in the health sector to strengthen (HDI) in North Sumatra. This study suggests a need for budget consistency in the infrastructure sector to ensure its long-term impact on HDI.*

**Keywords:** *health spending, infrastructure spending, HDI.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah di sektor kesehatan dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2014-2023. variabel independen dalam penelitian ini adalah belanja sektor kesehatan dan infrastruktur, sedangkan variabel dependen adalah (IPM). data sekunder diperoleh dari badan pusat statistik (BPS) dan direktorat jenderal perimbangan keuangan (DJPK). metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak Eviews 10. hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ipm, sedangkan belanja infrastruktur memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap ipm. uji f mengkonfirmasi bahwa secara simultan, bahwa belanja kesehatan dan infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap (IPM). koefisien determinasi (*adjusted R-squared*) menunjukkan bahwa variabel bebas menjelaskan 80,63% dari variasi (IPM). hasil ini menekankan pentingnya peningkatan dan stabilitas anggaran di sektor kesehatan untuk memperkuat ipm di Sumatera Utara. penelitian ini menyarankan perlunya konsistensi dalam anggaran infrastruktur agar dapat lebih terasa dalam jangka panjang.

**Kata kunci:** Belanja kesehatan, belanja infrastruktur, IPM.

### 1. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai subjek pembangunan memiliki peran yang sangat penting dan aktif dalam proses pembangunan itu sendiri. Mereka tidak hanya sekadar menjadi sasaran dari program-program pembangunan, tetapi juga terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada kehidupan mereka. Keterlibatan ini memungkinkan mereka untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan yang dapat membantu mengarahkan pembangunan menuju arah yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya mereka.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah cara untuk mengukur kemakmuran suatu wilayah atau negara berdasarkan tiga hal utama: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Indikator angka harapan hidup saat lahir mengukur kesehatan, indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan, dan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengukur pengeluaran (Ulfatussaniah et al., 2024).

Peningkatan kualitas pembangunan manusia dapat dilihat dari kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat. Kenaikan angka IPM menunjukkan perbaikan, Dengan meningkatnya IPM, kualitas hidup masyarakat diharapkan terus membaik, menciptakan generasi yang lebih produktif dan berdaya saing tinggi (Amalia & Purbadharmaja, 2014). Berikut dapat dilihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara.

Berdasarkan pada Tabel 1 menunjukkan indeks pembangunan manusia di provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014 -2023 setiap tahunnya meningkat. dari tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,62 pada tahun 2015. pada tahun 2016 indeks Pembangunan manusia sebesar 70,00 naik lagi dari tahun sebelumnya. bahkan dari tahun 2017-2023 indeks Pembangunan manusia di provinsi Sumatera utara terus meningkat, pada saat pandemi sekali pun indeks Pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara meningkat.

**Tabel 1. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2014-2023**

Tahun	Indeks Pembangunan manusia
2014	68,87
2015	69,52
2016	70,00
2017	70,57
2018	71,18
2019	71,74
2020	71,77
2021	72,00
2022	72,71
2023	73,37

Sumber: Badan pusat statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara 2023

Adapun Belanja kesehatan adalah jenis pengeluaran daerah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi wewenang pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Pengeluaran ini bertujuan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan kesehatan yang ditujukan bagi peningkatan layanan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut, termasuk pembangunan fasilitas kesehatan, pengadaan obat dan peralatan medis, serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit (Muliza et al., 2017).

Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator yang mewakili aspek kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) pada saat lahir. AHH digunakan untuk mengukur seberapa lama rata-rata usia yang diperkirakan akan dicapai oleh penduduk di suatu wilayah dalam periode tertentu. Tingginya angka harapan hidup menjadi cerminan dari kualitas perekonomian dan layanan kesehatan di suatu negara. Semakin baik kondisi ekonomi serta akses terhadap fasilitas kesehatan, semakin tinggi pula angka harapan hidup masyarakat di negara tersebut. Dengan kata lain, peningkatan (AHH) menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup yang lebih baik, yang diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan perkembangan pembangunan di berbagai bidang (SHELEMO, 2023). Terdapat pengeluaran sektor kesehatan di provinsi Sumatera Utara. Terdapat pengeluaran sektor kesehatan di Provinsi Sumatera Utara.

**Tabel 2. Belanja Sektor Kesehatan di Povinsi Sumatera Utara  
pada Tahun 2014-2023**

Tahun	Pengeluaran sektor Kesehatan (Milyar)	Perkembangan dalam bentuk (%)
2014	401.700,368,532	-
2015	398.538,445,217	-0,79
2016	573.270,936,435	43,84
2017	495.387,487,458	-13,59
2018	630.634,959,942	27,30
2019	578.525,156,664	-8,26
2020	703.619,487.660	21,62
2021	862.512.539.712,	22,58
2022	756.975.466.268,	-12,24
2023	774.654.470.796	2,34

*Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan(DJPK) diolah 2023*

Dari tabel 2 dapat di ketahui bahwa Kesehatan Di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014-2025 anggran sedikit menurun sebesar 0,79% dari tahun sebelumnya menjadi 398.5 miliar.pada tahun 2016 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 43,84% mencapai 573,3 miliar yang menunjukkan adanya penambahan untuk sektor Kesehatan. Pada tahun 2017 anggran Kembali menurun 13,59% menjadi 495.4 miliar. Pada tahun 2018 anggaraan sektor Kesehatan Kembali meningkat sebesar 27.30% menjadi 630,6 miliar.pada tahun 2019 anggaran Kembali menurun sebesar 8,26% menjadi 578,5 miliar.pada tahun 2020 peningkatan anggaran sebesar 21,62% menjadi 703,6 miliar.pada tahun 2021 anggaran Kembali meningkat sebesar 22,58% menjadi 862.25 miliar di pengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang membutuhkan anggran lebih besar untuk Kesehatan. Pada tahun 2022 menunjukkan penurunan anggaran sebesar 12,24 menjadi 757,0 miliar. Mungkin Disebabkan adanya kebutuhan mendesak terkait pandemi dan pengalihan anggaran sektor lain.pada tahun 2023 terjadi

peningkatan kecil dari tahun sebelumnya sebesar 2,34% mencapai 774,7 miliar. secara keseluruhan anggaran sektor Kesehatan di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi.

Perekonomian yang terintegrasi memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai. Sektor infrastruktur sama pentingnya dengan kesehatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur yang kurang memadai dapat menghambat iklim investasi di suatu negara, menghalangi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan jangka panjang (Ulfatussaniah et al., 2024).

Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Berikut data belanja sektor infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan tabel di bawah 1.3 pengeluaran sektor infrastruktur di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014-2015 anggaran naik sebesar 8,14% dari 1,27 triliun menjadi 1,37 triliun terdapat peningkatan untuk infrastruktur di provinsi Sumatera utara.pada tahun 2016 turun drastis sebesar 50,31% menjadi hanya 680,2 miliar penurunan besar ini bisa terjadi karena kebijakan pemerintah.pada tahun 2017 mengalami kenaikan besar 166,19% menjadi 1,81% kenaikan ini menunjukkan fokus besar terhadap infrastruktur. pada tahun 2018 mengalami penurunan ringan sebesar 7,10% mencapai 1.66 triliun. pada tahun 2019 Kembali berkurang sebesar 9,70% menjadi 1,52 Triliun. Pada tahun 2020 kembali turun sebesar 3,83% menjadi 1,46 triliun. penurunan berturut turut ini mungkin di sebabkan oleh perubahan fokus atau kebutuhan lainya.pada tahun 2021 mengalami penurunan rendah sebesar 33,54% menjadi 970,8 miliar kemungkinan di pengaruhi oleh situasi pandemi covid-19 dimana anggaran banyak di alihkan untuk penanganan krisis Kesehatan dan pemulihan ekonomi. Pada tahun 2022 dengan penurunan drastis sebesar 73.36% menjadi 258,6 miliar pengurangan besar ini mungkin untuk menyesuaikan ekonomi.pada tahun 2023 anggaran Kembali meningkat sebesar 37,53% menjadi 355.7 miliar menunjukkan usaha untuk untuk meningkatkan Kembali alokasi pada sektor infrastruktur.dari data tersebut terdapat fluktuasi(naik turun).

**Tabel 3. Belanja Sektor Infrastruktur Di Provinsi Sumatera Utara 2014-2023**

Tahun	Pengeluaran pada perumahan dan fasilitas Umum (Triliun)	Perkembangan dalam bentuk (%)
2014	1,265,970,424,498	-
2015	1,368,995,493,798	8,14
2016	680,215,556,542	-50,31
2017	1,810,684,168,973	166,19
2018	1,682,114,160,537	-7,10
2019	1,519,025,629,174	-9,70
2020	1.460.785.236.684	-3,83
2021	970.832.930.100	-33,54
2022	258.593.035.490	-73,36
2023	355.655.636.347	37,53

Sumber: Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan(DJPK) diolah 2023

Pentingnya ketersediaan Kesehatan dan infrastruktur merupakan salah satu hal yang dibutuhkan dalam mencapai indek Pembangunan manusia (IPM) . Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu aspek yang sangat vital dalam proses mempercepat pembangunan nasional.Kesehatandan infrastruktur diyakini sebagai salah satu roda penggerak bagi kesejahteraan .Pentingnya peranan kesehatan dan infrastruktur , maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Analisis Pengaruh Belanja pemerintah sektor kesehatan dan Infrastruktur di provinsi sumatera utara”.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Pengertian indeks Pembangunan manusia

IPM digunakan untuk membandingkan indikator internasional seperti harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup. Indikator ini membantu menilai tingkat pembangunan suatu negara dan dampak kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM berperan penting dalam membantu pemerintah dan masyarakat merancang kebijakan dan program yang meningkatkan kualitas hidup dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan, dengan mengidentifikasi kebutuhan serta tantangan pembangunan (Suhendi & Astuti, 2023).

Menurut Todaro, dalam (Lubis et al., 2024) menyatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi negara yang disusun berdasarkan pencapaian pada bidang pendidikan, kesehatan, dan juga pendapatan riil yang ditetapkan. Unsur-Unsur pembentuk IPM akan menggambarkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara yang rendah tidak berarti bahwa pembangunan manusianya juga rendah.

## **Teori Pengeluaran Pemerintah**

Teori Wagner Eka Agustina (2014) dalam (Siregar et al., 2017) menyatakan teori ini menekankan pada perkembangan persentase pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap Gross National Product. Menurutnya apabila dalam suatu perekonomian pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat, terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan dan sebagainya.

Teori Peacock dan Wiseman dalam (Siregar et al., 2017) mengatakan Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori ini memandang bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari pungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

## **Kesehatan**

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar Masyarakat, sehingga setiap warga berhak mendapatkan Kesehatan yang baik karena Kesehatan inti dari kesejahteraan Masyarakat (Setiawan & Fikriah, 2020).

Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Undang-undang di Indonesia yang mengatur mengenai anggaran kesehatan adalah UU No 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji (Republik Indonesia, 1945).

## **Infrastruktur**

Perekonomian yang terintegrasi membutuhkan pembangunan infrastruktur yang memadai. Sektor infrastruktur tidak kalah penting dengan sektor kesehatan dan pendidikan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Infrastruktur yang kurang memadai di suatu negara akan menjadi penghambat dalam perubahan iklim investasi di negara tersebut. Adapun peranan anggaran pemerintah pusat melalui alokasi Dana Transfer Umum (DTU) yaitu paling sedikit 25 persen untuk belanja infrastruktur daerah

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Penelitian Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan data yang digunakan yaitu data sekunder. Data tersebut diperoleh dan diterbitkan oleh lembaga lembaga terkait keuangan antara lain: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia dalam bentuk time series. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda Analisis dengan uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui besarnya variabel independen terhadap variabel dependen.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Uji Signifikan Secara Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan dan infrastruktur indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara. Penggunaan skala logaritma dalam menganalisis data, seperti dalam transformasi variabel ke dalam bentuk logaritma (natural) dalam model regresi yang pengelolaannya dibantu dengan menggunakan aplikasi Eviews 10.

#### Regresi Linear Berganda

**Tabel 4. Regresi Linear Berganda**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.174859	0.214400	5.479747	0.0009
X1	0.061552	0.014505	4.243659	0.0038
X2	-0.003966	0.005741	-0.690759	0.5120
R-squared	0.806369	Mean dependent var		1.852237
Adjusted R-squared	0.751045	S.D. dependent var		0.008721
S.E. of regression	0.004351	Akaike info criterion		-7.793278
Sum squared resid	0.000133	Schwarz criterion		-7.702502
Log likelihood	41.96639	Hannan-Quinn criter.		-7.892859
F-statistic	14.57558	Durbin-Watson stat		2.247651
Prob(F-statistic)	0.003195			

Sumber: eviews 10 diolah

Berdasarkan hasil di atas dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 1.174859 \text{ IPM} + 0.061552 \text{ X1 KST} - 0.003966 \text{ X2 IFS} + e$$

- 1) Nilai konstanta adalah sebesar 1.174859 dengan makna bahwa tanpa adanya variabel Kesehatan dan infrastruktur terhadap indeks Pembangunan manusia (IPM) di provinsi Sumatera Utara sudah mempunyai nilai sebesar 1.174859.
- 2) Nilai koefisien variable Kesehatan sebesar 0,061552 dengan nilai probabiliti 0.0038 lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  ( $0,0038 < 0,05$ ) yang artinya Kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks Pembangunan manusia.
- 3) Nilai koefisien variabel infrastruktur sebesar -0.003966 dengan nilai probabiliti 0,5120 lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  ( $0,5120 > 0,05$ ) yang artinya indeks pembangunan (IPM) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks Pembangunan manusia.

### **Hasil Uji Signifikan secara Simulta (Uji F)**

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kesehatan dan infrastruktur berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Maka diperoleh hasil uji F dan nilai F-satistic 14.57558 dengan probabiliti sebesar  $0.003195 < 0,05$ . Artinya Kesehatan dan infrastruktur secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara.

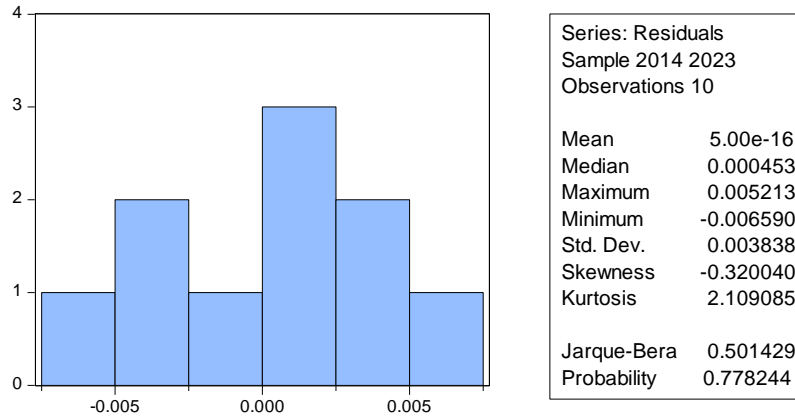
### **Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Analisi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel dependen. Adapun nilai koefisien determinasi persamaan dapat dilihat yaitu  $R\text{-squared} = 0.806369$  Nilai tersebut berarti seluruh variabel bebas, yakni variabel Kesehatan dan infrastruktur mempengaruhi variabel Indeks Pembangunan Manusia sebesar 80,63% sisanya 19,37 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.



## Hasil Uji Asumsi Klasik

### 1) Uji Normalitas



Sumber: eviews 10 diolah

Hasil uji normalitas di atas adalah nilai Jarque-Bera sebesar 0,501429 dengan probabilitas 0,778244 dimana  $> 0,05$  ( $\alpha$ ). Maka dengan demikian bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi secara normal (lolos normalitas), karena nilai probabilitasnya lebih besar dari level of significance ( $\alpha$ ).

### 2) Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.045967	24276.00	NA
X1	0.000210	15411.71	1.356431
X2	3.30E-05	2501.867	1.356431

Sumber: eviews 10 diolah

Syarat suatu data dinyatakan tidak korelasi antar variabel independen adalah data yang memiliki nilai VIF variabel independen  $< 10,00$ . penelitian ini memiliki nilai VIF variabel independen  $< 10,00$ . sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

### 3) Hasil Uji Heteroskedastisita

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.160399	Prob. F(2,7)	0.8548
Obs*R-squared	0.438201	Prob. Chi-Square(2)	0.8032
Scaled explained SS	0.119071	Prob. Chi-Square(2)	0.9422

Sumber: eviews 10 diolah

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai probabilitas Chi-Square lebih besar dari level of significance ( $\alpha$ ), yaitu  $0,8032 > 0,05$ . Maka hasil keputusannya Hipotesis diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas

#### 4) Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.452612	Prob. F(2,5)	0.6597
Obs*R-squared	1.532921	Prob. Chi-Square(2)	0.4647

Sumber: eviews 10 diolah

Berdasarkan tabel di atas uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai probabilitas Chi-square lebih besar dari level of significance ( $\alpha$ ), yaitu  $0,4647 > 0,05$ . Maka keputusan hipotesis diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah autokorelasi.

### Pembahasan

#### Pengaruh Belanja Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Variabel belanja kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan Dengan adanya layanan kesehatan yang lebih baik dan lebih merata, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk hidup lebih lama dan sehat, yang langsung berkontribusi pada peningkatan angka harapan hidup, salah satu indikator utama IPM. penelitian ini sejalan dengan penelitian (Mongan, 2019) dan (Harsono, 2024) yang menjelaskan bahwa kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

#### Pengaruh Belanja Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Variabel belanja infrastruktur berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) Di Provinsi Sumatera Utara. Infrastruktur yang kurang memadai akan menjadi penghambat dalam perubahan iklim investasi di suatu daerah. Penelitian ini tidak sejalan dengan studi (Maryozi et al., 2022) dan (Hamid et al., 2024) di mana penelitian mereka menjelaskan bahwa infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa belanja kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, belanja infrastruktur tidak memberikan dampak signifikan terhadap IPM dalam periode penelitian ini. Pemerintah disarankan untuk terus meningkatkan anggaran kesehatan guna mendukung kualitas hidup masyarakat. Selain itu, konsistensi alokasi anggaran di sektor infrastruktur perlu diperhatikan agar manfaatnya lebih terasa dalam jangka panjang.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tulus ditujukan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) atas data yang disediakan, yang menjadi dasar penting dalam analisis penelitian ini.

Penulis juga berterima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra atas fasilitas dan dukungan akademis yang telah diberikan. Terima kasih yang mendalam juga kepada para dosen pembimbing serta rekan-rekan yang telah memberikan masukan berharga selama proses penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan kebijakan daerah dan peningkatan kualitas pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara.

## DAFTAR REFERENSI

- Amalia, F. R., & Purbadharmaja, I. B. P. (2014). Pengaruh kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja terhadap indeks pembangunan manusia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(6), 257–264. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/8663>
- Andiny, P., & Sari, M. G. P. (2018). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 2(2), 116–125.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Booklet indeks pembangunan manusia metode baru*. Diakses melalui [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). *DJPK Kemenkeu*. Diakses melalui [djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id)
- Hamid, F., Samsir, A., & Alam, S. (2024). Analisis pengaruh belanja infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Barat. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 911–921.

- Harsono, dkk. (2024). The influence of education expenditure, health expenditure and social assistance expenditure on human development index in NTB province in 2013-2022. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 802–810. <http://journal.yrpiuku.com/index.php/msej>
- Lubis, C. S. L., Sari, C. M., Syahfitri, T. I., & Suharianto, J. (2024). Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Sumatera Utara tahun 2019–2022. *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 738–755.
- Maryozi, Z., Isyandi, B., & Aulia, A. F. (2022). Pengaruh pengeluaran bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 15(1), 1–11. <https://doi.org/10.31849/niara.v15i1.7380>
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>
- Muliza, M., Zulham, T., & Seftarita, C. (2017). Analisis pengaruh belanja pendidikan, belanja kesehatan, tingkat kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 51–69. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i1.6993>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945*, 4(1), 1–12.
- Setiawan, A., & Fikriah. (2020). Pengaruh belanja pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala*, 5(4), 212–221. <http://eprint.stieww.ac.id/1110/1/22%20Rolanda%20Aisha%20Hidarini%20dan%20Andy%20Dwi%20Bayu%20Bawono.pdf>
- Shelemo, A. A. (2023). No title. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Siregar, R., Nasution, H. F., & Tanjung, S. F. (2017). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 5(2), 82. <https://doi.org/10.24952/masharif.v5i2.1439>
- Suhendi, S., & Astuti, I. P. (2023). Analisis pengaruh tingkat kemiskinan, PDRB dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan pendidikan terhadap IPM di Provinsi Papua tahun 2017–2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 1676–1694. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3212>
- Ulfatussaniah, A., Murwiati, A., & Wahyudi, H. (2024). Pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan tingkat kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota di tiga provinsi termiskin di Pulau Sumatera. *Journal on Education*, 06(03), 16720–16729. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/5550>